

**PENDAPATAN MASYARAKAT PADA AREAL KPHP AWOTA
DI DESA ARAJANG KABUPATEN WAJO**

**ANWAR
105950025011**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

**PENDAPATAN MASYARAKAT PADA AREAL KPHP AWOTA
DI DESA ARAJANG KABUPATEN WAJO**

**ANWAR
105950025011**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan Strata
Satu (S-1)

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pendapatn Masyarakat Pada Areal KPHP Awota di Desa
Arajang Kabupaten Wajo

Nama : Anwar

Stambuk : 105950025011

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

Makassar, Juni 2018

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Husnah Latifah., S.Hut., M.Si
NBM : 742921



Dr. Hasanuddin Molo, S.Hut.,MP
NIDN : 0907028202

Diketahui,

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Program Studi Kehutanan


H. Hasanuddin S.Pi., MP.
NBM. 853 947


Dr. Hilmah., S.Hut., M.Si.
NIDN.0011077101

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul : Pendapatn Masyarakat Pada Areal KPHP Awota di Desa
Arajang Kabupaten Wajo

Nama : Anwar

Stambuk : 105950025011

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

SUSUNAN KOMISI PENGUJI

Nama

Tanda/Tangan

1. Husnah Latifah, S.Hut., M.Si.
Pembimbing I



2. Dr. Hasanuddin Molo, S.Hut., MP
Pembimbing II



3. Dr. Hikmah, S.Hut., M.Si.
Penguji I



4. Ir. M. Daud, S.Hut., M.Si., IPM.
Penguji II



Tanggal Lulus: 11 Agustus 2018

**PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI
DAN SUMBER INFORMASI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**PENDAPATAN MASYARAKAT PADA AREAL KPHP AWOTA DI DESA
ARAJANG KABUPATEN WAJO**

Adalah benar hasil karya sendiri yang belum di ajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang di terbitkan maupun tidak di terbitkan dari penulis lain telah di sebutkan dalam teks dan di cantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

Hak Cipta Milik Unismuh Makassar Tahun 2018

@ Hak Cipta di Lindungi Undang-Undang

1. *Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.*
 - a) *Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.*
 - b) *Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unismuh Makassar.*
2. *Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk laporan apa saja tanpa izin Unismuh Makassar.*

ABSTRAK

Anwar (105950025011). Pendapatan masyarakat pada Areal KPHP Awota di Desa Arajang Kabupaten Wajo. Di bawah **Bimbingan Husnah Latifah dan Hasanuddin Molo.**

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan di mulai dari bulan juli 2017 sampai dengan bulan September 2017. Adapun lokasi penelitian, di Areal KPHP Awota Desa Arajang Kabupaten Wajo.

Tujuan penelitian ini untuk mnegetahui berapa besar pendapatan masyarakat sekitar Desa Arajang Kabupaten Wajo.

Data yang diambil pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara, sedangkan data sekunder data-data yang diperoleh dari instansi terkait sebagai data penunjang yang meliputi jumlah penduduk, letak dan keadaan goeografis lokasi penelitian.

Penelitian ini mengambil populasi di Desa Arajang Kabupaten Wajo sebanyak 30 Orang. Teknik yang digunakan dalam memilih dan menentukan sampel penelitian, yaitu *sensus*.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan pendapatan masyarakat pada Areal KPHP Awota di Desa Arajang Kabupaten Wajo sebesar Rp 1.297.570.000 atau dengan rata-rata Rp 43.252.333,33 / KK.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya Shalawat dan Salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pendapatan Masyarakat Pada Areal KPHP Awota di Desa Arajang Kabupaten Wajo”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Kehutanan (S.Hut) pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua Orang tua penulis bapak Jamaluddin dan ibu Nurlaela yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih, dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak H. Burhanuddin, S.Pi.,MP. Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibunda Dr. Hikmah, S.Hut., M.Si selaku Ketua Jurusan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibunda Husnah Latifah, S.Hut., M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Hasanuddin Molo, S.Hut., MP selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu banyak hal selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu Dosen dan Para Staf Karyawan Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah menuangkan banyak ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Kepala Desa Arajang dan Semua Warga yang telah banyak membantu penulis selama tahap pengumpulan data penelitian.
8. Teman-teman Mahasiswa Pertanian Program Study Kehutanan 2011 yang telah banyak memberikan ilmu, Semangat dan pengalaman hidup.
9. Saudaraku Marzuki Syam terima kasih atas inspirasi, masukan dan diskusinya selama ini.

Billahifisabili lHaqfastabiqulkhairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI	v
HAK CIPTA	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian	4
4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
1. Pendapat	5
2. Pendapat dan pengeluaran rumah tangga	5
3. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	7
4. Kerangka berpikir.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	13
1. Tempat dan Waktu Penelitian	13
2. Objek dan alat penelitian.....	13
3. Populasi dan Sampel	13
4. Teknik pengumpulan data	14

5. Jenis Data	14
6. Analisi Data.....	14
BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI.....	
1. Sejarah Pembentukan Wilayah KPHP Awota.....	17
2. Letak, Luas dan Batas Wilayah KPHP Awota.....	18
3. Aksesibilitas Kawasan Hutan.....	21
4. Keadaan iklim	21
5. Topografi.....	24
6. Tanah.....	25
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
1. Identitas responden.....	29
a. Umur	29
b. Pendidikan Responden.....	29
c. Jumlah Tanggungan Keluarga.....	29
2. Penerimaan Masyarakat	32
3. Total Biaya	33
4. Pendapatan Rumah Tangga.....	34
5. Kontribusi.....	35
BAB VI PENUTUP	
1. Kesimpulan	36
2. Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Sebaran Areal KPHP Model Awota Menurut Fungsi Dan Wilayah Administrasi Kecamatan.	17
2.	Sebaran Wilayah KPHP Awota Berdasarkan Wilayah Administrasi Desa Kabupaten Wajo	18
3.	Jumlah Curah Hujan Dan Hari Hujan KPHP Awota Tahun 2007-2011	20
4.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur	27
5.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	28
6.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pekerjaan.....	29
7.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Tanggungan Keluarga	29
8.	Persentase Penerimaan Dari Hasil Hutan Kayu Pada Kawasan Areal KPHP Di Desa Arajang Kabupaten Wajo	30
9.	Penerimaan Responmden Dari Sector Lain	31
10.	Total Biaya Pengeluaran Jati	31
11.	Total Biaya Sector Lain	32
12.	Total Pendapatan Rumah Tangga	32

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kerangka pikir penelitian	11
2.	Pengambilan data pohon	64
3.	Pengambilan data pohon	64
4.	Produksi coklat	65
5.	Produksi kayu jati.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Identitas Responden	35
2.	Identitas Pekerjaan Responden	36
3.	Produksi Kakao	37
4.	Pengeluaran Produksi Kakao	39
5.	Produksi Jambu Mente	50
6.	Pengeluaran Produksi Jambu Mente	51
7.	Produksi Jagung	55
8.	Pengeluaran Produksi Jagung	56
9.	Produksi Kacang Tanah	57
10.	Pengeluaran Produksi Kacang Tanah	57
11.	Produksi Kayu Jati	58
12.	Pengeluaran Produksi Kayu Jati	61
13.	Dokumentasi	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan untuk penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan (departemen kehutanan, 1999). Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara karena hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut Bahrani (1999), manfaat hutan ada 2 yaitu: Manfaat langsung yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan utama yang digunakan sebagai bahan bakar maupun sebagai bahan bangunan dan Manfaat tidak langsung yaitu manfaat yang tidak langsung dinikmati tetapi dapat dirasakan karna keberadaan hutan itu sendiri. Manfaat tidak langsung tersebut antara lain dapat mengatur tata air dan mencegah erosi.

Pengelolaan hutan dan kehutanan pada prinsipnya merupakan proses pengelolaan terhadap keseluruhan komponen ekosistem termasuk manusia pemanfaatan hutan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi telah menyingkirkan aspek ekologi dan hak-hak sosial budaya masyarakat lokal terhadap hutan. Salah satu upaya pokok pembangunan kehutanan yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam dan disekitar hutan untuk berkontribusi besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Kondisi sosial ekonomi yang rendah terlebih dampak krisis ekonomi pemilikan lahan yang sempit dan rendahnya pendapatan dari hasil pertanian serta kurangnya keterampilan berusaha di luar sektor pertanian mendorong masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan untuk mencari sumber pendapatan dari hutan yang merupakan kawasan terdekat dari pemukiman.

Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, sebagaimana di amanahkan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pembangunan KPH terus bergulir dan mendapatkan dukungan yang terus meningkat dari berbagai pihak. Secara garis besar, pembangunan KPH telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Penetapan wilayah KPH Sulawesi Selatan di dasarkan pada Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga dalam satu wilayah KPH terdiri dari 1 Kabupaten kecuali KPH Larona Malili yang hanya terletak di Kabupaten Luwu Timur, KPH Selayar Di Kabupaten Selayar dan Areal KPH Awota di Kabupaten Wajo. KPH Awota di tetapkan berdasarkan No. SK 979/Menhut-II/2013 oleh Menteri

Kehutanan dengan luas area 19.071 ha, penetapan ini kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati No. 14 Tahun 2014 tentang pembentukan UPTD KPHP di Kabupaten Wajo. Sehingga jumlah KPH di Sulawesi Selatan saat ini berjumlah 12 KPH yang terdiri atas 7 KPHL, 4 KPHP dan 1 KPHK.

Berdasarkan kebijakan yang tertuang pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan hutan. Tugas dan fungsi tersebut yang meliputi : (1) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, (2) Pemanfaatan hutan, (3) Penggunaan hutan, (4) Rehabilitasi hutan dan reklamasi dan (5) Perlindungan hutan dan konservasi alam. Penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh Areal KPHP Awota diharapkan lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan hutan secara lestari.

KPH memiliki peran strategis dalam upaya mendukung penyelenggaraan pembangunan kehutanan, yaitu (1) Wujud nyata desentralisasi sektor kehutanan (2) Memaksimalkan akses masyarakat terhadap hutan (3) menjamin penyelenggaraan pengelolaan hutan yang tepat lokasi, tepat sasaran tepat kegiatan dan tepat pendanaan, (4) memberi kemudahan dalam investasi pembangunan sektor kehutanan (5) menjamin peningkatan keberhasilan penanganan rehabilitasi dan reklamasi, dan (6) mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon.

Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Awota Wajo merupakan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang sangat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Salah satu desa yang masih sangat berpartisipasi yaitu Desa Arajang dengan luas 2138.44 Ha. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana Kontribusi Areal KPHP Awota terhadap pendapatan masyarakat sekitar Desa Minangatellu Kabupaten Wajo.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini berapa besar pendapatan areal KPHP Awota terhadap pendapatan masyarakat sekitar Desa Arajang Kabupaten Wajo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar pendapatan Areal KPHP Awota terhadap pendapatan masyarakat sekitar Desa Arajang Kabupaten Wajo.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan menjadi dasar penelitian lebih lanjut tentang bentuk-bentuk kontribusi Areal KPHP Awota terhadap pendapatan masyarakat sekitar Desa Arajang Kabupaten Wajo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendapatan

Menurut Suwardi (2001) pengertian pendapatan adalah suatu penambahan aset yang mengakibatkan bertambahnya *Owner's Equity*, tetapi bukan karena penambahan modal dari pemiliknya dan bukan pula merupakan penambahan aset yang disebabkan karena bertambahnya *liabilities*

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan yang diperoleh dari usaha dengan biaya atau tenaga yang dikeluarkan untuk usaha tersebut.

2.2. Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga

Menurut Sundawati dan Altonsus (2008), pendapatan rumah tangga menurut sumbernya dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu pendapatan kehutanan dan pendapatan non-kehutanan. Pendapatan kehutanan adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan di hutan, sedangkan pendapatan non-kehutanan adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan di luar kehutanan.

Sundawati dan Altonsus (2008) menyatakan pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diperoleh oleh seluruh anggota keluarga, baik suami, istri maupun anak. Pendapatan rumah tangga dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Pendapatan dari usaha bertani
- b. Pendapatan yang mencakup usaha bertanam padi, palawija, dan kegiatan pertanian lainnya

- c. Pendapatan yang diperoleh dari seluruh kegiatan termasuk sumber-sumber mata pencaharian di luar pertanian.

Berdasarkan keterkaitan antara keluarga dan rumah tangga, maka rumah tangga terdiri atas dua macam, yakni :

1. Rumah tangga keluarga

Rumah tangga keluarga adalah sebuah rumah tangga yang anggotaanggotanya terikat oleh hubungan perkawinan, darah, atau adopsi.

Rumah tangga keluarga terdiri atas :

- a. Rumah tangga suami dan istri
- b. Rumah tangga suami, istri, dan anak-anaknya
- c. Rumah tangga suami dan istri, dan anak-anak tinggal di rumah tangga yang berbeda (misalnya anak sekolah di luar kota atau sudah memiliki rumah sendiri)
- d. Rumah tangga orang tua tunggal (ayah saja atau ibu saja)
- e. Rumah tangga lainnya (saudara sekandung, atau anggota keluarga lainnya tinggal bersama dalam satu rumah)

2. Rumah tangga bukan keluarga

Rumah tangga bukan keluarga adalah rumah tangga yang anggotaanggotanya tidak terikat oleh hubungan perkawinan, darah atau adopsi. Rumah tangga bukan keluarga terdiri atas:

- a. Rumah tangga yang dihuni oleh seorang pria sendiri.
- b. Rumah tangga yang dihuni oleh seorang wanita sendiri
- c. Rumah tangga yang dihuni oleh dua orang atau lebih yang tidak memiliki

hubungan keluarga.

Total pengeluaran rumah tangga adalah sejumlah pengeluaran berbentuk uang yang dilakukan oleh suatu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam kurun waktu tertentu (BPS 2000 dalam Sulistiana 2008).

Menurut Sumarwan (2011), jumlah anggota keluarga atau rumah tangga akan menentukan jumlah dan pola konsumsi suatu barang dan jasa. Rumah tangga dengan jumlah anggota yang lebih banyak akan membeli dan mengonsumsi beras, daging, sayuran, dan buah-buahan lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga yang memiliki anggota yang lebih sedikit. Jumlah anggota keluarga akan menggambarkan potensi permintaan terhadap suatu produk dari sebuah rumah tangga.

2.3. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Kementerian Kehutanan, 2010). KPH merupakan areal/wilayah yang penutupannya didominasi oleh hutan dan mempunyai batas yang jelas, yang dikelola untuk untuk memenuhi serangkaian tujuan yang ditetapkan secara eksplisit sesuai rencana pengelolaan jangka panjang. Keseluruhan wilayah KPH akan mempunyai batas yang jelas baik dilapangan maupun didalam peta (Kementerian Kehutanan, 2011).

Dalam satu wilayah KPH dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan yang penamaannya ditentukan oleh fungsi hutan dominan. KPH dikelola oleh organisasi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan hutan

(Kementerian Kehutanan, 2011).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Kementerian Kehutanan, 2010), meliputi :

1. KPH Konsevasi (KPHK) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayah seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi.
2. KPH Lindung (KPHL) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.
3. KPH Produksi (KPHP) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.

Kementerian menetapkan organisasi KPHK, sedangkan untuk KPHP dan KPHL ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHP dan KPHL. Untuk KPHP dan KPHL penetapannya dan wilayahnya lintas kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi dan bertanggung jawab kepada Gubernur, sedangkan untuk KPHP dan KPHL yang berada di wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Bupati (Kementerian Kehutanan, 2011).

Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut (Kementerian Kehutanan, 2011) :

1. Tata hutan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
2. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin.
3. Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin.

4. Pemanfaatan di wilayah hutan.
5. Rehabilitasi hutan dan reklamasi.
6. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
7. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional,Provinsi,Kabupaten/kota untuk diimplementasikan.
8. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengergonisasian dan pengawasan serta pengendalian.
9. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

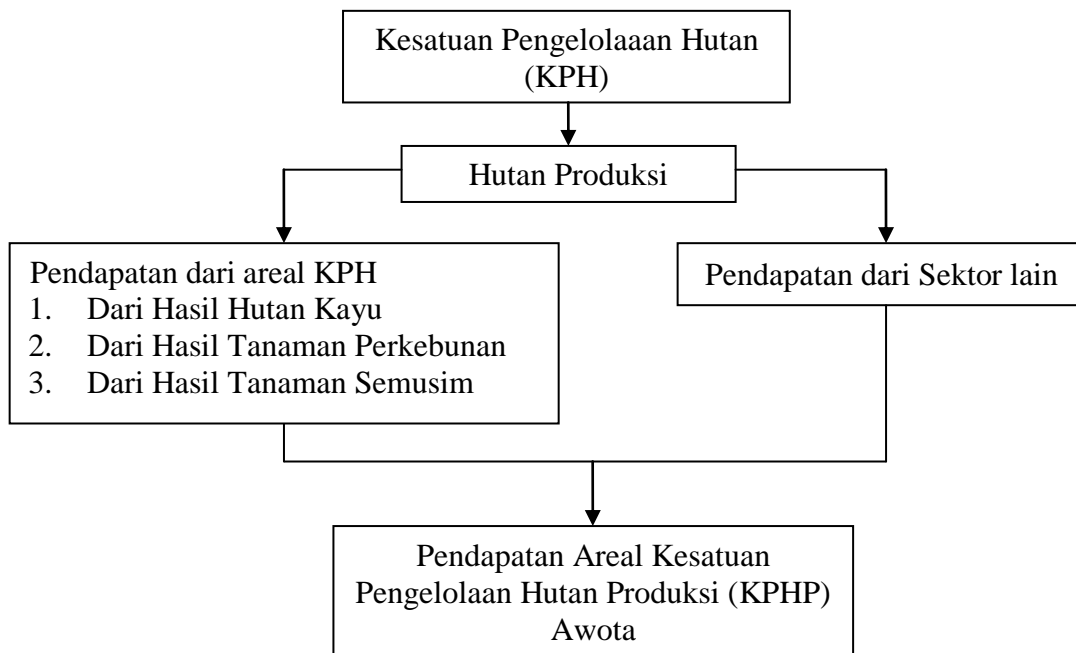
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPH yaitu pada penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sedangkan tugas pokok dan fungsi dinas kehutanan yaitu penyelenggaraan pengurusan/administrasi (Kementerian Kehutanan,2011).

Kegiatan pengelolaan hutan yang bertujuan memproduksi hasil hutan umumnya melibatkan kegiatan-kegiatan seperti inventarisasi hutan, tata hutan dan membentuk blok petak, pelaksanaan silvikultur, seperti penanaman, penjarangan, pemotongan, dll. Dalam sebuah KPH, manajemen sumberdaya hutan tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan tersebut, karena didalam KPH dimungkinkan adanya perusahaan mandiri dan kelompok masyarakat pengelola hutan. Manajemen sumberdaya hutan dalam lingkup KPH dimulai dengan penetapan rencana jangka panjang. Tujuan dalam rencana jangka panjang tersebut akan diselaraskan dengan tujuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rencana jangka panjang ini akan dipastikan arah jangka panjang para

pemegang izin, dan pengelolaan hutan lainnya dalam pengelolaan KPH tersebut, serta kebijakan dan strategi penanganan masalah yang dihadapi dalam mewujudkan rencana jangka panjang tersebut. Dalam prakteknya, pengelola KPH perlu mempertimbangkan kebutuhan bersama semua pihak di dalam KPH, seperti aksesibilitas dan infrastruktur, tenaga kerja, penyelesaian konflik, pendampingan, dll. Itulah sebabnya berbagai instansi pemerintah, pemegang izin (jika ada), masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi perlu dilibatkan dalam penyusunan rencana jangka panjang dan rencana kerja tahunan. Partisipasi mereka diharapkan meningkatkan peluang terjadinya sinergi kegiatan semua pihak dalam KPH tersebut (Kementerian Kehutanan, 2011)

Pengelola KPH adalah pihak yang mengetahui kondisi kehutanan di lapangan. Oleh karena itu, meskipun proses administrasi perizinan berada di tangan pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, namun pengelola KPH memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana masyarakat dapat siap menerima dan mengimplementasikan izin tersebut atau bagaimana para pengusaha aman menjalankan usaha setelah menerima izin. Dalam konteks demikian itu, pengelola KPH dapat disebut sebagai lembaga yang secara sosial politik mendapat legitimasi dari masyarakat, dengan kewenangan teknis dan fungsional untuk melakukan pengelolaan hutan di tingkat lapangan, namun memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara adil dan aman (Kementerian Kehutanan, 2011).

2.4. Kerangka Pikir



Gambar 1. Skema Pendapatan Areal KPHP Awota terhadap pendapatan masyarakat sekitar

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka, melalui penelitian ini dapat di ketahui kondisi masyarakat yang berada di sekitar Areal KPHP Awota Desa Minangattellue Kabupaten Wajo, Pengelolaan Areal Kesatuan Pemanfaatan Hutan Produksi Awota yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Diharapkan dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat melalui Pengelolaan Areal Kesatuan Pemanfaatan Hutan Produksi maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir penelitian dapat dilihat diatas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan di KPHP Awota Desa Minangatellue Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan, dimulai dari bulan juli sampai dengan september 2017.

3.2. Objek dan Alat Penelitian

1. Objek Penelitian

Masyarakat yang terlibat dalam Areal Pengelolaan Kesatuan Pemanfaatan Hutan Produksi Awota Desa Minangatellue Kabupaten Wajo.

2. Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Daftar pertanyaan.
- b. Alat tulis untuk mencatat setiap informasi responden.
- c. Kamera (foto), untuk dokumentasi.
- d. Kalkulator

3.3. Populasi Dan Sample

Anggota populasi sebanyak 30 responden yang terdapat pada kelompok tani dalam Desa Minangatellue Kabupaten Wajo dan dilakukan secara sensus.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengambilan data sebagai berikut :

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Adapun objek yang diteliti adalah pendapatan masyarakat yang terlibat langsung dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Desa Arajang Kabupaten Wajo.
- b. Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, disusun secara sistematis sehingga dapat berfungsi interview schedule dalam penelitian.

3.5. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data Primer
Data primer dikumpulkan melalui pengisian kuisisioner dan wawancara masing-masing responden, yang meliputi: nama, umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan)
- b. Data Sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait sebagai data penunjang, meliputi: keadaan fisik lokasi dan keadaan social budaya

3.6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif:

1. Analisis Kualitatif adalah analisis data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pertanyaan-pertanyaan bukan dalam bentuk angka. Data

kuantitatif diperoleh melalui pengumpulan data wawancara atau observasi, gambar yang melalui pemotretan.

2. Analisis kuantitatif

Untuk mengetahui berapa besar pendapatan dari kegiatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Total Penerimaan (TR)

$$TR = Y \times P$$

Ket :

$$TR = \text{Total Penerimaan}$$

$$Y = \text{Produksi yang diperoleh}$$

$$P = \text{Harga}$$

Pendapatan (I)

$$I = TR - TC$$

Ket :

$$I = \text{Pendapatan}$$

$$TR = \text{Total Penerimaan}$$

$$TC = \text{Total Cost}$$

Total Pendapatan

$$I = I_1 + I_2$$

Ket, :

$$I_1 = \text{Pendapatan Komuditi Hutan}$$

$$I_2 = \text{Pendapatan Sektor Lain}$$

Kontribusi (P)

$$P = \frac{Q_x}{Q_y} \times 100\%$$

Ket. :

P = Kontribusi Pendapatan

Q_x = Pendapatan Komuditi Hutan

Q_y = Total Pendapatan

BAB IV

KEADAAN UMUM LOKASI

4.1. Sejarah Pembentukan Wilayah KPHP Awota

Pembentukan KPHP Awota tidak terlepas dari lahirnya 10 wilayah KPH di Sulawesi Selatan. Menteri kehutanan melalui Surat Keputusan No. SK.88/Menhut-II/2011 telah menetapkan 10 wilayah KPH di Sulawesi Selatan, yaitu KPH Bila, KPH Jeneberang, KPH Kalaena, KPH Noling-Gilireng, KPH Larona Malili, KPH Maros-Sawitto, KPH Rongkong, KPH Saddang, KPH Selayar, dan KPH Walanae. Dari sepuluh wilayah KPH tersebut, terdapat hanya satu wilayah KPH yang wilayahnya berada di dalam satu kabupaten yaitu KPH Larona-Malili di Kabupaten Luwu Timur, sedangkan wilayah sembilan KPH lainnya berada pada lebih dari satu wilayah kabupaten. Mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, kawasan hutan Kabupaten Wajo masuk di dalam dua wilayah KPH yaitu sebagian berada di dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit V yang wilayahnya mencakup 7 wilayah kabupaten (Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Palopo, Sidrap, Toraja, Wajo) dan sebagian berada di dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VI yang wilayahnya juga mencakup 7 kabupaten (Barru, Bone, Gowa, Maros, Sidrap, Soppeng, Wajo) (Supratman, 2014).

Lebih lanjut Supratman 2014, menjelaskan bahwa konsekwensi wilayah KPH yang tersebar pada beberapa kabupaten adalah wilayah KPH tersebut relatif luas, rawan konflik kepentingan antar pemerintah dan masyarakat antar kabupaten,

serta berpotensi menimbulkan pengelolaan yang tidak efektif dan tidak efisien. Sementara itu, tujuan utama pembangunan KPH adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan di lapangan. Menyadari konsekwensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Wajo berinisiatif membangun wilayah KPH sendiri yang diawali dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo.

Setelah UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan terbentuk, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo mengusulkan kepada Bupati Wajo untuk membentuk KPH Model Awota. Selanjutnya Bupati Wajo mengusulkan kepada Menteri Kehutanan RI melalui surat Nomor 522/103/Dishutbun, tanggal 22 Februari 2013, agar KPHP Model Awota ditetapkan menjadi salah satu KPHP di Kabupaten Wajo. Pada tanggal 27 Desember 2013, Menteri Kehutanan menetapkan wilayah KPHP Model Awota, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.979/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan luas Wilayah KPHP Model Awota adalah ± 19.071 ha, yang merupakan penggabungan dari sebahagian wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit V yang berada di Kabupaten Wajo dan sebahagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VI yang berada di Kabupaten Wajo.

4.2. Letak, Luas dan Batas Wilayah KPHP Awota

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.979/Menhut-II/2013, luas wilayah KPHP Model Awota adalah ± 19.071 ha,

terdiri atas kawasan hutan dengan fungsi produksi seluas 13.532 ha dan kawasan hutan dengan fungsi lindung seluas 5.539 ha. Berdasarkan hasil analisis peta, batas-batas wilayah administrasi areal KPHP Model Awota terdiri atas, sebelah Utara dengan Kabupaten Sidrap, sebelah Selatan dengan Kecamatan Gilireng dan Maniangpajo, sebelah Barat dengan Kecamatan Keera, dan sebelah Timur dengan Kecamatan Maniangpajo. Sebaran areal KPHP Model Awota menurut wilayah administrasi kecamatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 10. Sebaran Areal KPHP Model Awota menurut Fungsi dan Wilayah Administrasi Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Menurut Fungsi Kawasan Hutan (ha)		Jumlah (ha)
		HP	HL	
1.	Keera	2.482,89	3.241,07	5.723,96
2.	Sajoanging	1.244,21	800,98	2.045,19
3.	Pitumpanua	0,0	1.196,19	1.196,19
4.	Maniangpajo	3.801,61	0,0	3.801,61
5.	Gilireng	5.042,06	0,0	5.042,06
Jumlah		12.570,77	5.238,24	17.809,01

Sumber: BPKH Wilayah VII, Makassar, 2014.

Berdasarkan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa wilayah KPHP Model Awota tersebar pada lima kecamatan dan sebagian besar (60,45%) berada di Kecamatan Keera dan Kecamatan Gilireng. Dari sisi fungsi kawasan hutan, areal KPHP Model Awota di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Gilireng seluruhnya adalah kawasan hutan dengan fungsi produksi, sedangkan areal KPHP Model di Kecamatan Pitumpanua seluruhnya adalah kawasan hutan dengan fungsi lindung. Sebaran areal KPHP Model Awota secara rinci menurut wilayah administrasi desa disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Wilayah KPHP Awota berdasarkan Wilayah Administrasi Desa, di Kabupaten Wajo

No.	Kecamatan	Desa	Luas (ha)
1.	Keera	Paojepe	473.31
		Keera	411.08
		Pattirolokka	293.39
		Inrello	148.88
		Ciromanie	990.05
		Lalliseng	932.57
		Awo	948.65
		Awota	938.80
Jumlah			5136.73
2.	Sajoanging	Barangmamase	479.85
		Akkotengeng	374.95
		Alewadeng	167.70
		Minangae	8.16
		Akkajeng	0.56
		Sakkoli	1237.34
		Jumlah	
3.	Pitumpanua	Tellesang	101.95
		Batu	14.85
		Siwa	240.78
		Bulete	107.84
		Benteng	389.30
		Tobarakka	343.19
		Jumlah	
4.	Maniangpajo	Mattirowalie	77.88
		Abbanuange	1041.56
		Sogi	546.92
		Minanga Tellue	2138.44
		Jumlah	
5.	Gilireng	Lamata	443.29
		Arajang	1776.29
		Paselloreng	859.30
		Alausalo	20.96
		Jumlah	
Total			17.809,01

Sumber: BPKH Wilayah VII Makassar, 2014

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa areal KPHP Model Awota tersebar pada 5 kecamatan dan 28 desa. Dari 5 kecamatan luas areal wilayah KPHP Awota paling dominan berada pada Kecamatan Keera seluas 5136.73 ha dan

wilayah KPHP Awota paling sedikit berada di Kecamatan Pitumpanua hanya seluas 1197.91 ha.

4.3. Aksesibilitas Kawasan Hutan

Areal KPHP Model Awota tersebar di dua wilayah yaitu areal dengan kawasan hutan fungsi lindung terletak di bagian utara areal KPHP dan kawasan hutan dengan fungsi produksi terletak bagian barat areal KPHP. Areal KPHP dapat diakses dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat melalui jalan darat. Batas luar areal KPHP dapat dicapai dalam waktu 1 – 2 jam dari arah Selatan melalui Kota Sengkang, Ibukota Kabupaten Wajo. Sedangkan areal KPHP yang lebih jauh dari pinggiran hutan hanya dapat diakses dengan kendaraan roda dua. Areal KPHP Model Awota dapat pula diakses dari arah Utara melalui Kota Palopo dengan jarak tempuh kurang lebih 2-3 jam dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua, sedangkan dari arah Selatan, areal KPHP Model Awota hanya dapat diakses dengan kendaraan roda dua.

4.4. Keadaan Iklim

Kondisi iklim wilayah KPHP Awota dan sekitarnya secara umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musim, hal ini dikarenakan wilayahnya berbatasan dengan laut lepas (Teluk Bone) dan angin disekitar Danau Tempe. Berdasarkan hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Wajo di Sengkang dalam empat tahun terakhir (Tabel 14) memperlihatkan rata-rata hari hujan dan curah hujan berkisar antara 1147.8 - 1652.9 mm/tahun dan hari hujan sekitar 167-199 hari/tahun. Curah

hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Awo. Musim hujan dimulai pada Bulan September hingga Bulan Mei dan setelah itu memasuki musim kemarau.

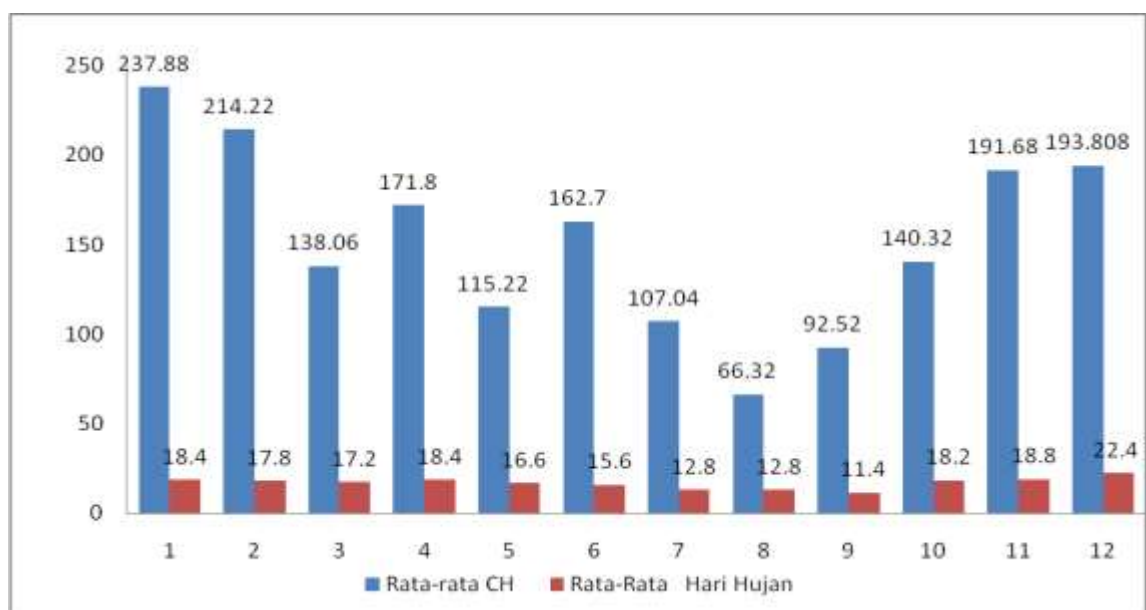
Tabel 3. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Di KPHP Awota Tahun 2007 s/d 2011

No.	Bulan	Curah Hujan					Hari Hujan				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	Januari	270.1	203	297.8	218.5	200	18	17	19	18	20
2	Februari	262.5	153.1	163.2	292.3	200	18	20	22	16	13
3	Maret	198.1	67.7	139.6	84.9	200	18	20	13	17	18
4	April	181.7	214.2	148	115.1	200	21	22	17	13	19
5	Mei	123.1	33.6	122.3	196.1	101	16	11	20	24	12
6	Juni	264.2	167.5	60.6	260.2	61	22	15	7	25	9
7	Juli	49	95.3	59.5	270.4	61	7	17	13	22	5
8	Agustus	63	68.6	32.6	106.4	61	13	18	8	22	3
9	September	72	166	60.2	103.4	61	6	11	6	25	9
10	Oktober	59	209.2	116.5	215.9	101	16	22	12	22	19
11	Novembr	170.6	210.4	152.5	224.9	200	19	22	15	16	22
12	Desember	180.2	265.4	154.14	169.3	200	23	23	13	27	26
Jumlah		1472.4	2254	1712.9	2557.4	1659.6	197	218	165	247	175

Sumber: Kabupaten Wajo Dalam Angka Tahun 2015

Berdasarkan hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Wajo dalam empat tahun terakhir rata-rata curah hujan dan hari hujan berkisar antara 1147,8 – 1652,9 mm / tahun dan hari hujan sekitar 167 – 199 hari / tahun.

Dan dapat di lihat pada diagram batang di bawah ini :



Gambar 2. Diagram Rata-Rata Curah Hujan dan Rata-Rata Jumlah Hari Hujan

Menurut peta zona agroklimatologi skala 1:750.000 yang dibuat oleh Balai Informasi Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Kabupaten Wajo mempunyai tipe iklim C1, D1, D2, E2 dan E3 yang pengertian dan penyebarannya adalah sebagai berikut

- Zona Iklim C1 : Jumlah bulan basah: 5-6 bulan, jumlah bulan kering: kurang dari 2 bulan. Yang termasuk zona iklim tersebut adalah pada bagian timur laut Kabupaten Wajo meliputi sebagian Kecamatan Pitumpanua yang terletak di pinggir Teluk Bone.
- Zona Iklim D1 : Jumlah bulan basah : 3-4 bulan, jumlah bulan kering kurang dari 2 bulan. Yang termasuk zona iklim tersebut adalah pada wilayah bagian Timur Kabupaten Wajo meliputi bagian Kecamatan Takkalalla, Sajoanging, Majauleng, Pitumpanua dan Kecamatan Maniangpajo.
- Zona Iklim D2 : Jumlah bulan basah : 3-4 bulan, jumlah bulan kering 2-3 bulan. Yang termasuk zona iklim tersebut meliputi wilayah bagian Tengah Kabupaten Wajo yang membujur arah utara selatan meliputi Kecamatan Majauleng, Maniangpajo dan Kecamatan Pammana.
- Zona Iklim E2 : Jumlah bulan basah kurang dari : 3 bulan, jumlah bulan kering 2-3 bulan. Yang termasuk dalam zona iklim tersebut meliputi wilayah bagian barat Kabupaten Wajo

atau sebagian dari Kecamatan Belawa, Tanasitolo, Tempe dan Kecamatan Sabbangparu.

- Zona Iklim E3 : Jumlah bulan basah kurang dari 3 bulan, jumlah bulan kering 3- 5 bulan. Yang termasuk zona iklim tersebut hanya sebagian kecil wilayah pada bagian barat Kabupaten Wajo yang terletak di sebelah utara dan selatan Danau Tempe atau sebagian dari wilayah Kecamatan Belawa dan Kecamatan Sabbangparu.

Variasi jumlah bulan basah dari nol sampai hanya dua sampai tiga bulan per tahun. Jumlah curah hujan tahunan hanya sekitar 1.000 mm (rata-rata di bawah 1.000 mm). Klasifikasi iklim dibuat berdasarkan sistem yang digunakan Oldeman (Oldeman dan Sjarifuddin, 1977). Sementara, data curah hujan yang diperoleh dari stasiun-stasiun pengukuran hujan yang ada di Kabupaten Wajo dalam Assessment, dan data suhu, angin ataupun kelembapan udara di wilayah ini.

4.5. Topografi

Wilayah Kabupaten Wajo berada pada ketinggian yang bervariasi antara 0 – 500 meter di atas permukaan laut, terdiri atas seluas 57.263 ha atau sebesar 22,85% berada pada ketinggian 0 - 7 m dpl, seluas 94.539 ha atau sebesar 37,72 % berada pada ketinggian 8 - 25 m dpl, seluas 87.419 ha atau sebesar 34,90 % berada pada ketinggian 26 – 100 m dpl, seluas 11.231 ha atau sebesar 4,5 % berada pada ketinggian 101 – 500 m dpl., serta seluas 167 ha atau sebesar 0,66 % berada pada ketinggian diatas 500 m dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Wajo tergolong datar dengan kemiringan 0 – 2% dengan luas mencapai 212.341

ha atau sekitar 84% sedangkan lahan datar hingga bergelombang dengan kemiringan 3 - 15% dengan luas 21.116 Ha (8,43%), lahan yang berbukit dengan kemiringan diatas 16 - 40% dengan luas 13.753 Ha (5,5%) dan Kemiringan lahan diatas 40% dengan luas 3.316 ha (1,32%).

Areal KPHP Model Awota berada pada ketinggian yang bervariasi antara 0 – 500 meter di atas permukaan laut. Bentuk permukaan kawasan KPHP Model Awota bervariasi dari datar, bergelombang sampai berbukit. Bagian kawasan yang berbukit terletak pada sisi utara atau terletak Kecamatan Keera. Adapun kelerengan di KPHP Model Awota bervariasi mulai dari kelerengan 0 – 8%, 8-15% sampai dengan 15 – 25%.

4.6. Tanah

Berdasarkan peta jenis tanah di KPHP Model Awota terdapat beberapa jenis tanah yaitu, aluvial, latosol, grumosol, litosol dan podzolik merah kuning. Tanah Aluvial merupakan tanah subur yang cocok digunakan untuk sistem pertanian intensif. Tanah aluvial adalah tanah muda yang dalam proses pembentukannya masih terlihat campuran antara bahan organik dan bahan mineral. Tanah Alluvial berwarna kelabu muda bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfat yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO₂ dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal yang dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen berbetuk persegi sedang sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya. Beberapa peneliti lain menyatakan bahwa tanah Aluvial berwarna kelabu sampai kecoklat-coklatan. Tekstur tanahnya liat atau liat berpasir, mempunyai konsistensi keras waktu kering dan teguh pada waktu

lembab. Kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Reaksi tanahnya dari asam, netral sampai basa. Berdasarkan bahan induknya terdapat tanah Aluvial pasir, lempung, kapur, basa, asam dan lain-lain. Tanah Aluvial hanya meliputi lahan yang sering atau baru saja mengalami banjir, sehingga dapat dianggap masih muda dan belum ada diferensiasi horison. Endapan aluvial yang sudah tua dan menampakkan akibat pengaruh iklim dan vegetasi tidak termasuk aluvial.

Suatu hal yang mencirikan pada pembentukan aluvial ialah bahwa bagian terbesar bahan kasar akan diendapkan tidak jauh dari sumbernya. Tekstur bahan yang diendapkan pada waktu tempa yang sama akan lebih seragam, makin jauh dari sumbernya makin halus butir yang diangkut. Karena itu terbentuk akibat banjir di musim hujan, maka sifat bahan – bahannya juga tergantung pada kekuatan banjir dan macam bahan yang diangkut, sehingga menampakkan ciri morfologi berlapis – lapis atau berlembaran–lembaran yang bukan horison karena bukan hasil perkembangan tanah.

Tanah Alluvial pada proses pembentukannya sangat tergantung dari bahan induk asal tanah dan topografi, punya tingkat kesuburan yang bervariasi dari rendah sampai tinggi, tekstur dari sedang hingga kasar, serta kandungan bahan organic dari rendah sampai tinggi dan pH tanah berkisar masam, netral, sampai alkalin, kejenuhan basa dan kapasitas tukar kation juga bervariasi karena tergantung dari bahan induk.

Tanah podsolik merupakan tanah yang memiliki tingkat kesuburan sedang. Tanahnya berwarna merah atau kekuning-kuningan. Tanah podsolik mempunyai

karakteristik tekstur yang lempung atau berpasir dengan PH rendah serta memiliki kandungan unsur aluminum dan besi yang tinggi. Karakteristik lain yang dapat ditemui pada tanah podsolik adalah daya simpan unsur hara sangat rendah karena bersifat lempung yang beraktivitas rendah, kejenuhan unsur basa seperti K, Ca, dan Mg, rendah sehingga tidak memadai untuk tanaman semusim, kadar bahan-bahan organik rendah dan hanya terdapat di permukaan tanah saja, dan penyimpanan air sangat rendah sehingga mudah mengalami kekeringan.

Hasil survai pada beberapa plot di wilayah KPHP Model Awota, ditemukan jenis tanah pada titik-titik pengamatan adalah jenis tanah litosol atau biasa disebut “laterit”. Jenis tanah ini terbentuk dari proses letusan gunung berapi dan sedimen keras dimana proses pelapukan kimianya dengan bantuan organisme hidup dan pelapukan fisiknya dengan bantuan sinar matahari dan hujan. Jenis tanah ini dapat dijumpai di lereng gunung atau perbukitan atau tanah datar seperti yang terdapat pada lokasi inventarisasi areal KPHP Awota. Penampang umumnya tebal dan besar serta berbentuk kerikil, pasir atau batu-batuan kecil. Tanah atasnya mengandung beberapa persen bahan organik. Berwarna coklat, kuning, hingga kemerahan. Jenis tanah ini juga dapat dijumpai di daerah tanah datar dan sekitar pantai.

Jenis tanah lainnya yang dijumpai pada lokasi plot adalah jenis tanah podsolik. Tanah ini merupakan tanah yang memiliki tingkat kesuburan sedang. Tanahnya berwarna merah atau kekuning-kuningan. Tanah podsolik mempunyai karakteristik tekstur yang lempung atau berpasir dengan PH rendah serta memiliki kandungan unsur aluminum dan besi yang tinggi. Karakteristik lain yang dapat

ditemui pada tanah podsolik adalah daya simpan unsur hara sangat rendah karena bersifat lempung yang beraktivitas rendah, kejenuhan unsur basa seperti K, Ca, dan Mg, rendah sehingga tidak memadai untuk tanaman semusim, kadar bahan-bahan organik rendah dan hanya terdapat di permukaan tanah saja, dan penyimpanan air sangat rendah sehingga mudah mengalami kekeringan. Perbaikan sifat fisika tanah ini dapat ditanggulangi dengan perbaikan sifat ketahanan daya penyimpanan air. Sementara itu, perbaikan sifat kimiawinya bisa dilakukan dengan memperbaiki kandungan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Identitas responden adalah gambaran tentang kondisi atau keadaan narasumber yang menjadi objek penelitian. Identitas responden dalam penelitian ini meliputi umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendapatan.

1. Umur Responden

Umur dan pendapatan berdasarkan penelitian ini tidak mempunyai hubungan satu sama lain karena ada beberapa responden yang umurnya sudah tua tetapi menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dibandingkan yang masih muda.

Berdasarkan penelitian dari hasil wawancara responden sebanyak 30 KK masyarakat, umur responden berkisar antara 26-67 tahun. Jumlah responden berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

Kelompok Umur	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
26-32	7	23,33
33-39	6	20
40-46	9	30
47-53	5	16,66
54-60	-	-
61-67	3	10
Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa sebanyak 7 orang berumur 26-32 tahun atau 23,33%, 6 orang berumur 33-39 atau 20%, 9 orang berumur 40-46

atau 30%, 5 orang berumur 47-53 atau 16,66% dan 3 orang berumur 61-67 atau 10%.

2. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan penelitian dengan wawancara tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 5 dengan jumlah responden 30 orang.

Tabel 5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	Tidak Tamat SD	8	26,66
2.	SD	17	56,66
3.	SMP	3	10
4.	SMA	-	-
5.	SARJANA	2	6,66
Jumlah		30	100

Sumber: Dta Primer Setelah diolah,2017

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 30 orang responden di KPHP Awota Kabupaten Wajo tidak tamat SD sebanyak 8 orang responden, tingkat SD sebanyak 17 orang responden, tingkat SMP sebanyak 3 orang responden dan tingkat sarjana 2 orang responden.

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi dalam mengelolah usahanya yaitu bagaimana cara yang tepat dalam mengelola usahanya untuk meningkatkan jumlah produksi dan juga pendapatannya. Tingkat pendidikan dan besar pendapatan seseorang mempunyai hubungan satu sama lain, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin banyak pula pengetahuan yang diperoleh, sehingga seseorang mampu untuk menerapkan dalam kehidupan terutama dalam mengelolah hutan

3. Pekerjaan

Beberapa diantara responden di KPHP Awota Kabupaten Wajo yang bekerja selain yang bertani merupakan pekerjaan sampingan dan ada pula yang bertani merupakan pekerjaan pokok. Berikut adalah klasifikasi responden berdasarkan pekerjaannya.

Tabel 6. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan		Jumlah (Orang)	Presentase (%)
	Pokok	Sampingan		
1.	Petani	-	27	90
2.	PNS	Petani	2	6,67
3.	Wiraswasta	Petani	1	3,33
Jumlah			30	100

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa responden yang bekerja sebagai petani tanpa ada pekerjaan sampingan lebih banyak yaitu sebanyak 27 orang responden, sedangkan responden yang bekerja sampingan sebagai petani dan pekerjaan pokok sebagai PNS 2 orang responden dan pekerjaan pokok wiraswasta sebanyak 1 orang responden.

4. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga responden berdasarkan hasil wawancara dilapangan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Tanggungan Keluarga

Tanggungan Keluarga	Jumlah (orang)	Presentase (%)
2-3	8	26,66
4-5	19	63,33
6-7	3	10
Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa responden yang memiliki tanggungan 2-3 orang sebanyak 8 KK atau 26,66%, 4-5 orang sebanyak 19 KK atau 63,33% dan 6-7 orang sebanyak 3 KK atau 10%.

1.2. Penerimaan Masyarakat

1. Penerimaan Kayu Jati

Sebagian besar masyarakat di Desa Arajang lebih menyukai menanam Jati di bandingkan dengan kayu lainnya. Hal tersebut di karenakan masyarakat memiliki beberapa alasan, yaitu Jati merupakan kayu yang cocok dibuat untuk membangun rumah, bibit Jati banyak tersedia dibandingkan dengan bibit kayu lainnya, Jati tidak memerlukan perawatan intensif. Lahan milik petani (responden) bervariasi yaitu dari 0,50 Ha sampai dengan 1 Ha.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari 30 responden yang mengelolah dari hasil hutan. Pendapatan bersih dari hasil hutan kayu dalam pengelolaan kawasan KPHP di Desa Arajang selama satu tahun (Tahun 2016) dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Presentase Penerimaan Dari Hasil Hutan Kayu Pada Kawasan Areal KPHP di Desa Arajang Kabupaten Wajo

Jenis Komuditi	Volume (m ³)	Harga (Rp/m ³)	Penerimaan (Rp)
Kayu Jati	132.53	1.150.000	152.409.500
Rata-rata	1.3253	1.150.000	1.524.095

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa dari total volume kayu adalah 132,53 m³ didapatkan rata-rata 1.3253 m³ dengan harga jual Rp. 1.150.000 m³ jadi didapatkan penerimaan adalah sebesar Rp. 152.409.500 atau rata-rata Rp. 1524095,-/tahun/KK.

2. Penerimaan Sektor Lain

Di kawasan KPHP Awota Kabupaten Wajo selain hasil hutan kayu (jati) petani juga menanam tanaman perkebunan dan tanaman semusim seperti kakao, jambu mente, jagung, kacang tanah. Penerimaan sektor lain dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Penerimaan Responden dari Sektor Lain

No.	Komoditi	Jumlah (Orang)	Penerimaan (Rp/Tahun)
1	Kakao	30	1.188.200.000
2	Jambu mente	13	50.760.000
3	Jagung	6	17.000.000
4	Kacang Tanah	2	630.000
Jumlah			1.256.590.000
Rata-rata			314.147.500

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa penerimaan kakao setiap tahun petani mendapatkan sebesar Rp. 1.188.200.000/Tahun, penerimaan jambu mente sebesar Rp. 50.760.000/Tahun, penerimaan jagung sebesar Rp. 17.000.000/Tahun dan penerimaan kacang tanah sebesar Rp. 630.000/Tahun. Adapun total penerimaan dari sektor lain petani yaitu Rp. 1.256.590.000/Tahun atau dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp. 314.147.500/KK/tahun.

1.3. Total Biaya

1. Total biaya kayu jati

Total biaya usaha komoditi kayu jati dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Total Biaya Pengeluaran Kayu Jati

Jenis Komuditi	Pengeluaran (Rp)
Kayu Jati	12.380.000
Rata-rata	123.800

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa total pengeluaran komoditi kayu sebesar Rp. 12.380.000/Tahun atau rata-rata sebesar Rp. 123.800

2. Total biaya sektor lain

Total biaya usaha komoditi sektor lain dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Total Biaya Sektor Lain

No.	Komoditi	Jumlah (Orang)	Pengeluaran (Rp/Tahun)
1	Kakao	30	79.620.000
2	Jambu mente	13	12417.000
3	Jagung	6	6462500
4	Kacang Tanah	2	550000
Jumlah			99049500
Rata-rata			24762375

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 11 menunjukkan bahwa rata-rata biaya usaha sektor lain keseluruhan yaitu Rp. 24.762.375/Tahun untuk biaya seperti pupuk urea, pupuk Za, pupuk TSP, pupuk NPK, pestisida gramosom, sabit, cangkul, dan alat semprot.

1.4. Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga petani dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Total Pendapatan Rumah Tangga

Komoditi	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp/Tahun)	Pendapatan (Rp)
Kayu Jati	152.409.500	12.380.000	140.029.500
Kakao	1.188.200.000	79620000	1.108.580.000
Jambu mente	50.760.000	12417000	38.343.000
Jagung	17.000.000	6462500	10.537.500
Kacang Tanah	630.000	550000	80.000
Jumlah	1.408.999.500	111.429.500	1.297.570.000

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 12 menunjukkan bahwa total pendapatan petani di KPHP Awota Kab. Wajo sebesar Rp. 1.297.570.000

1.5. Kontribusi Rumah Tangga

Setelah total pendapatan diperoleh, kemudian untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan komoditi kayu selama setahun maka dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P &= \frac{\text{Total Rata-rata Pendapatan Kayu } \left(\frac{Rp}{Thn}\right)}{\text{Total Pendapatan Rata-rata Keluarga } \left(\frac{Rp}{Thn}\right)} \times 100\% \\ &= \frac{1.400.295}{289.385.125} \times 100\% \\ &= 0,0048 \times 100\% \\ &= 0,48\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa kontribusi komoditi kayu selama setahun di kawasan KPHP Awota Kab. Wajo sebesar 0,48% . Hal ini dimaksud dari total pendapatan pendapatan rata-rata rumah tangga petani kayu jati dan total pendapatan rata-rata keluarga (sektor lain).

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan pendapatan responden petani kayu jati selama setahun yaitu Rp. 140.029.500 dan memberikan kontribusi kepada responden sebesar 0,48% terhadap total pendapatan responden

6.2. Saran

Adapun saran yaitu sebaiknya perlu dilakukan pemeliharaan yang lebih intensif terhadap hutan produksi di Desa Arajang dan pembinaan petani hutan dan pertania

DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, 2012. Pengertian Kontribusi. Dikutip dari <http://www.annahira.com/beasiswa.html>. Diakses pada tanggal 12 mei 2017
- BPS. 2000. *Sensus pertanian indonesia*. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- BPKH 2014. *Sebaran Wilayah KPHP Awota Berdasarkan Wilayah Adaministrasi Desa di Kabupaten Wajo. Makassar*.
- Bahrani, 1999. *Diklat Penelitian Sumberdaya Hutan dan Lingkungan. Fakultas Kehutanan*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Departemen Kehutanan. 1999. *Hutan Dan Kehutanan. Universitas Sumatera Utara*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 61 Tahun 2010. *Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja KPHP dan KPHL*.
- Sumaryanto, 2006. *Pengertian Kontribusi*. Skripsi. Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- Sumarwan 2011. *Potensi Permintaan Terhadap suatu produk*. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Sundawati dan Altonsus, 2008. *Sumber Pendapatan Rumah Tangga yang Potensial di Danau Toba*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam.
- Suwardi, P.2001. *Studi Potensi Hutan dan Kontribusinya pada Pendapatan Petani Petani Hutan Rakyat di Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan*. Bandar Lampung: Skripsi UNILA.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Sekretariat Negara. Jakarta*.

RIWAYAT HIDUP



ANWAR, Lahir pada tanggal 13 Januari 1993 di Pokanga Kabupaten Jeneponto merupakan anak ke 1 dari 2 bersaudara dari pasangan ayah Jamaluddin dan Ibu Nurlaela.

Penulis memulai pendidikan tingkat dasar pada tahun 1999 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 36 Kapita Jeneponto dan tamat pada tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama (SMP) 2 Bangkala Jeneponto dan tamat pada tahun 2008. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah Kejuruan (SMK) 4 Jeneponto dan tamat pada tahun 2011. Dan tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi Kehutanan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Makassar.